



**ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
AMERIKA SERIKAT DALAM *PARIS AGREEMENT* PADA MASA
PEMERINTAHAN JOE BIDEN**

**Fuad Rizki Satriyo, Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D, Muhammad
Faizal Alfian, S.IP., M.A.**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website: [http://
www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The change in leadership from Donald Trump to Joe Biden brought a new policy direction for the United States. One of them is the Paris Agreement. Biden's concern for the issue of climate change led the United States to change its foreign policy in the Paris Agreement, namely ratification after it was previously issued during the Trump administration. This study presents the formulation of the problem "How can changes in US foreign policy in the Paris Agreement in the era of Joe Biden be seen through green theory?". Through the formulation of the problem, this study explains how green theory sees changes in US foreign policy in the Paris Agreement during the reign of Joe Biden. This research is a qualitative type with explanatory data analysis techniques. In conducting research, green theory and the Holsti foreign policy analysis model are used to explain how the role of the leader as the main actor influences the making of a country's foreign policy. This research found that the difference in policy focus between Trump and Biden was a factor in the change in US foreign policy in the Paris Agreement during the reign of Joe Biden.

Keywords: *Joe Biden, Foreign Policy Change, Paris Agreement, Climate Change, Green Theory.*

PENDAHULUAN

Climate change atau yang biasa disebut dengan perubahan iklim adalah salah satu isu dalam lingkungan. Dewasa ini, isu ini semakin berkembang di seluruh dunia seiring dengan meningkatnya emisi semakin bertambahnya waktu. Isu lingkungan mengenai

perubahan iklim ini mulai dikenal dan berkembang sejak dimulainya revolusi industri, tepatnya antara tahun 1750-1850 (Hananto, 2018). Pada 1850, saat revolusi industri sedang dalam puncaknya, emisi pemerangkap-panas global menunjukkan angka 865 megaton. Berselang hampir 2 abad setelahnya, tepatnya pada 2015, pemerangkap-panas global menunjukkan angka 46,6 gigaton emisi, yang artinya menunjukkan kenaikan lebih dari 150x lipat (Hananto, 2018). Namun, walau mengambil data dalam rentang waktu yang sangat jauh, negara-negara yang berkontribusi besar dalam peningkatan emisi ini tidak berubah, antara lain adalah Amerika Serikat.

Pada tahun 1992 dunia internasional bekerjasama melalui PBB dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang memiliki nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, Brazil (Rhodes, 2016). Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari konferensi sebelumnya, yaitu *United Nations Conference on Human Environment* yang dilaksanakan di Stockholm pada tahun 1972 untuk membahas mengenai Tragedi Minamata yang merupakan isu lingkungan pertama yang menjadi perhatian dunia (Hachiya, 2006). Konferensi di Rio tersebut juga membahas permasalahan di sektor lingkungan yang dampaknya semakin terasa di seluruh negara. Dari konferensi tersebut, hadirilah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC merupakan salah satu bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi isu lingkungan. UNFCCC ini kemudian mengadakan pertemuan rutin tahunan yang dikenal dengan *Conference of Parties* (COP) guna membahas lebih dalam mengenai isu lingkungan dan tindakan penanggulangannya (Maciej Serda, 2013).

Pada COP-21 yang diselenggarakan di Paris, dihasilkan sebuah kesepakatan yang bernama *Paris Agreement*. Poin utama dari kesepakatan ini adalah agar setiap negara berkomitmen untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca mereka, untuk menjaga peningkatan suhu bumi stabil kurang dari 2°C pada abad ini (Maciej Serda, 2013). Kesepakatan ini dapat dianggap menjadi salah satu yang paling sukses selama COP dilaksanakan, karena hampir semua negara yang hadir saat itu setuju untuk meratifikasi kesepakatan ini, termasuk Amerika Serikat (Sipayung, 2015). Namun, pada masa

pemerintahan Donald Trump, tepatnya pada tahun 2017, Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement*. Sesudah menjabat sebagai Presiden selama 4 tahun, Trump resmi digantikan oleh Joe Biden pada 2021. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden, Joe Biden berkomitmen untuk mengembalikan Amerika Serikat bergabung kembali dalam *Paris Agreement*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik penelitian hampir serupa untuk dijadikan sebagai referensi. Penelitian terdahulu pertama yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah skripsi yang berjudul “Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Keputusan Donald Trump Keluar dari *Paris Agreement*” yang ditulis oleh Devi Malinda (2018). Penelitian tersebut berfokus tentang alasan mengapa Donald Trump menarik diri dari Kesepakatan Paris serta terhadap proses di balik pembuatan keputusan itu. Kemudian, referensi kedua adalah skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan National Sword Tiongkok terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia melalui Perspektif *Green Theory*” yang ditulis oleh Siska Dewi Paramitha (2021). Penelitian tersebut berfokus tentang mengapa Tiongkok menggunakan kebijakan *National Sword* sebagai upaya mengurangi ekspor-impor sampah dari negara lain menggunakan perspektif *green theory*. Terakhir, penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah jurnal berjudul “Analisis Emosi Presiden Donald Trump terhadap Penarikan Diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement*” yang ditulis oleh Irene F. Sinaga dan Mohammad Rosyidin (2020). Penelitian ini berfokus tentang pengaruh emosi dari Donald Trump yang akhirnya membuat Amerika Serikat menarik diri dari *Paris Agreement*.

Dari beberapa referensi tersebut, terdapat kekosongan penelitian dalam aspek bagaimana teori hijau dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden. Melalui kekosongan tersebut, penelitian ini akan membawa pengaruh faktor lingkungan dari Joe Biden selaku aktor utama pengambil kebijakan sebagai subjek analisis dalam terjadinya perubahan

kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden yang juga didukung dengan model analisis perubahan kebijakan luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe kualitatif, di mana penelitian ini menganalisis mengenai fenomena perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* yang terjadi pada masa pemerintahan Joe Biden. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan secara dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah eksplanatif, di mana penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana Teori Hijau dan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden yang didukung oleh data primer serta sekunder yang diambil dari berbagai sumber. Penelitian ini membuktikan keterkaitan antara teori dengan hipotesis penelitian yang dimiliki, yaitu adanya perbedaan fokus kebijakan antara Donald Trump yang antroposentris dan Joe Biden yang ekosentris mempengaruhi Joe Biden untuk membuat perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan meratifikasi kembali *Paris Agreement*.

KERANGKA TEORI

Pada studi hubungan internasional, sebelumnya tidak ada sebuah teori yang secara spesifik dapat menjembatani para peneliti untuk menganalisis mengenai isu lingkungan dalam hubungan internasional. Hadirnya teori hijau, yakni sebuah teori pada studi hubungan internasional yang menjelaskan lebih spesifik dari teori lain dalam isu mengenai lingkungan, membantu para peneliti modern yang ingin menganalisis isu lingkungan dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu, pada penelitian yang memiliki kaitan dengan

lingkungan ini, digunakan teori hijau untuk menganalisis perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di masa kepemimpinan Joe Biden.

Dyer (2018) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, teori hijau memiliki prinsip yang bernama ekosentrisme dan antroposentrisme. Ekosentrisme merupakan sebuah prinsip yang berfokus terhadap lingkungan yang bertentangan langsung dengan prinsip antroposentrisme yang berfokus terhadap manusia. Ekosentrisme memiliki prioritas terhadap ekosistem tempat manusia tinggal karena ekosistem merupakan kunci bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia. Sebaliknya, prinsip antroposentrisme tidak memiliki prioritas terhadap ekosistem tempat manusia tinggal karena antroposentris hanya melihat lingkungan sebagai instrumental jangka pendek bagi manusia. Teori hijau juga melihat bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dialami manusia dari tahun ke tahun ini antara lain disebabkan oleh sebuah sistem yang hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan manusia tanpa mempedulikan dampaknya untuk lingkungan (antroposentris).

Selain menggunakan teori hijau, penelitian ini juga menggunakan model analisis kebijakan luar negeri sebagai alat analisis. Holsti (1982) mengkaji mengenai perubahan kebijakan luar negeri dan mengemukakan tipe-tipe mengenai perubahan kebijakan luar negeri tersebut, tipe tersebut antara lain adalah tipe restrukturisasi (*restructuring*). Tipe restrukturisasi tersebut menurut Holsti (1982) merupakan sebuah tipe dimana terjadinya perubahan secara dramatis dari sebuah pola hubungan eksternal pada suatu negara. Restrukturisasi tidak sama dengan perubahan kebijakan luar negeri lain, dimana umumnya perubahan kebijakan luar negeri terjadi secara lambat, sedangkan restrukturisasi ini berlangsung cepat serta mengokohkan suatu niat mengenai perubahan secara fundamental. Holsti (1982) mengajukan sebuah model untuk mengkaji tentang bagaimana proses perubahan kebijakan luar negeri tipe restrukturisasi tersebut tercipta. Model pengujian yang diajukan Holsti (1982) tersebut memuat tiga variabel, antara lain adalah variabel independen, variabel antara, serta variabel dependen. Variabel independen ini antara lain memuat tentang faktor ancaman eksternal dan ancaman domestik, sedangkan variabel

antara adalah faktor persepsi dan kalkulasi pengambil kebijakan, dan variabel dependen yaitu restrukturisasi berupa penghentian kebijakan

PEMBAHASAN

Permasalahan Lingkungan yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Masyarakat Amerika Serikat

Sejak masa revolusi industri, Amerika Serikat adalah salah satu negara penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia, bersama dengan Tiongkok dan India. Dalam perkembangannya, gas karbon ini kemudian menimbulkan banyak masalah pada sektor lingkungan yang tidak hanya dihadapi oleh para negara penghasil gas emisi, tetapi juga negara-negara lain yang menghasilkan emisi lebih sedikit. Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar tentu merasakan dampak yang ditimbulkan dari gas emisi tersebut, dimana dampak yang dihasilkan tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat Amerika Serikat. Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang dirasakan oleh Amerika Serikat tersebut antara lain yaitu:

(a) Kekeringan di California

Beberapa wilayah di California yang relatif basah pada musim dingin yang lalu meningkatkan optimisme bahwa kekeringan yang melanda wilayah tersebut akan berakhir setelah berlangsung selama empat tahun. Tetapi ketika jurnalis *New York Times* mengunjungi Taman Nasional Yosemite pada bulan April tahun 2016, ia menemukan sebuah fakta yang mengkhawatirkan; dimana sebenarnya wilayah ini masih dalam ancaman kekeringan berkepanjangan akibat fenomena *La Nina* yang terjadi (The New York Times, 2016). Kehadiran *La Nina* berpotensi membawa wilayah California kembali ke fase kekeringan setelah sebelumnya mendapatkan curah hujan yang lumayan melegakan.

(b) Polusi Udara di Amerika Serikat

Dilansir dari (Lee, 2021) lebih dari 135 juta orang Amerika hidup dengan udara yang tercemar, menempatkan kesehatan dan kehidupan mereka dalam risiko. Polusi udara tetap menjadi salah satu masalah lingkungan utama di Amerika Serikat, di mana jumlah orang Amerika yang terpapar kualitas udara yang buruk secara konsisten lebih dari 125 juta sejak 2013. Terdapat dua polutan udara lokal yang banyak dijumpai di Amerika Serikat; yakni polusi partikel halus dan polusi ozon troposfer. Polusi partikel halus mengacu pada potongan-potongan kecil padatan atau cairan di udara yang terdiri dari kontaminan seperti debu, jelaga kotoran dan asap. Hampir 21 juta orang di AS diperkirakan tinggal di negara-negara dengan tingkat polusi partikel yang tidak sehat sepanjang tahun.

Polutan ozon di permukaan tanah, sementara itu, sering lebih dikenal dengan nama lain: kabut asap (*smog*). Ini tercipta ketika polutan dari kendaraan, pembangkit listrik, dan sumber lain yang diketahui bereaksi secara kimia di udara di bawah sinar matahari. Lebih dari 123 juta individu di AS diperkirakan tinggal di negara bagian dengan polusi ozon yang buruk, dengan lebih dari 28 juta di antaranya adalah anak-anak dan 18,2 juta berusia 65 tahun atau lebih (Lee, 2021). Kualitas udara yang buruk juga merugikan AS sekitar \$617 miliar dalam kerusakan setiap tahun, menurut Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*). Selain itu, EPA (*Environment Protection Agency*) memperkirakan AS menghabiskan sekitar \$65 miliar setiap tahun untuk membersihkan polusi yang ada di udara (U.S. Environmental Protection Agency, 2011).

(c) Polusi Air di Amerika Serikat

Kebijakan Undang-undang Air Bersih (*The Clean Water Act*), yang disahkan sekitar 50 tahun yang lalu, dinilai telah gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Ali, 2022). Hampir setengah dari sungai dan aliran di seluruh Amerika Serikat dianggap telah terlalu tercemar untuk memenuhi standar

kualitas untuk sarana rekreasi, ekosistem kehidupan biota air, atau sebagai sumber air minum.

Proyek Integritas Lingkungan atau *Environmental Integrity Project* (EIP), menerbitkan sebuah laporan yang menemukan hasil yang mengkhawatirkan dari tes kualitas air dalam seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat. Sebanyak lebih dari 700.000 mil saluran air, atau sekitar 51 persen dari sungai dan aliran sungai yang dinilai telah tercemari oleh polusi yang ada (Ali, 2022). Laporan tersebut menemukan wilayah Indiana berada di puncak daftar negara bagian dengan saluran air paling kotor, dengan total 24.395 mil sungai dan aliran sungai dianggap terganggu untuk sarana rekreasi.

IPCC (2014) menjelaskan bahwa emisi tinggi yang terus berlanjut akan menyebabkan sebagian besar dampak negatif bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan pembangunan ekonomi serta memperbesar risiko bagi mata pencaharian dan bagi ketahanan pangan dan manusia. Keamanan manusia terancam oleh isu perubahan iklim karena perubahan iklim memiliki pengaruh dalam terganggunya mata pencaharian, peningkatan konflik, perubahan budaya, dan migrasi penduduk (Subiyanto et al., 2018). Masalah-masalah tersebut terjadi karena perubahan iklim yang semakin parah dari waktu ke waktu. Amerika Serikat sebagai salah satu negara penghasil emisi gas terbesar di dunia tentu berperan besar dalam terjadinya masalah tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki urgensi untuk kembali meratifikasi *Paris Agreement* agar dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat perubahan iklim yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga seluruh dunia.

Kebijakan dan Posisi Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di bawah Donald Trump

Pada masa pemerintahan selanjutnya, yaitu saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden pada tahun 2017, AS menarik diri dari kesepakatan yang telah mereka ratifikasi pada tahun 2015. Donald Trump dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun 2016 menyatakan bahwa ia merupakan seorang yang skeptis terhadap isu lingkungan hidup (Zhang et al., 2017). Hal ini pun langsung terealisasi ketika Trump terpilih sebagai Presiden AS untuk menggantikan Obama pada tahun 2017.

Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari *Paris Agreement* pada saat kepemimpinan Donald Trump sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan, karena Trump dalam pidato saat kampanyenya sudah mencanangkan bahwa jika terpilih menjadi Presiden akan menarik diri dari *Paris Agreement*. Trump menganggap *Paris Agreement* ini merugikan AS dari sektor perekonomian, ia menganggap kesepakatan tersebut menghambat sektor ekonomi Amerika karena harus mengontrol emisi gas rumah kaca dari pabrik yang melakukan proses produksi, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian yang awalnya mungkin menguntungkan AS karena AS dapat melakukan produksi yang bernilai jutaan dolar, namun sejak adanya kesepakatan tersebut AS tidak bisa mendapat keuntungan maksimal dikarenakan ada aturan yang mengikat untuk menekan proses produksinya (Kompas, 2020). Menurut Zhang et al. (2017) terdapat beberapa alasan yang menjadi faktor pendorong Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, yaitu; keterikatan Trump dengan industri perminyakan yang tidak ramah lingkungan, melemahnya pengaruh AS dalam dunia internasional, skeptis terhadap dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim, dan, *Paris Agreement* memiliki keterkaitan yang kental terhadap kebijakan Presiden sebelumnya, yaitu Obama.

Berdasar penjelasan di atas, jika dianalisis menggunakan teori hijau, kebijakan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* serta sektor lingkungan pada masa pemerintahan Donald Trump cenderung bersifat antroposentris. Dyer (2018) menjelaskan bahwa antroposentrisme merupakan prinsip yang tidak memiliki prioritas terhadap ekosistem tempat manusia tinggal karena antroposentris hanya melihat lingkungan sebagai

instrumental jangka pendek bagi manusia. Hal ini sesuai dengan penjelasan di atas yang menyatakan bahwa Trump menganggap *Paris Agreement* ini merugikan AS dari sektor perekonomian karena mengganggu proses produksi, yang menjadi salah satu faktor Trump menarik Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*.

Kebijakan dan Posisi Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di bawah Joe Biden

Setelah resmi diangkat sebagai Presiden, Biden bergerak cepat dalam mengambil kebijakan luar negeri Amerika Serikat, salah satunya dalam sektor lingkungan. Biden bersumpah untuk bergerak cepat dalam tindakan perubahan iklim, dan keterlibatannya dengan ilmuwan di seluruh pemerintahan menandai awal dari pembalikan kebijakan besar setelah empat tahun melemahnya aturan iklim Amerika Serikat selama masa pemerintahan Donald Trump yang mendukung produsen bahan bakar fosil (Newburger, 2021). Terbukti, Presiden Joe Biden langsung menandatangani perintah eksekutif saat hari pertama bertugas agar Amerika Serikat bergabung kembali dengan *Paris Agreement*, yang merupakan upaya internasional terbesar untuk mengekang pemanasan global, setelah saat dalam kepemimpinan Donald Trump Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari perjanjian tersebut (Rott, 2021).

Winarno (2014) mengemukakan bahwa penyebab perubahan iklim adalah kegiatan industrialisasi yang menghasilkan gas rumah kaca, dimana gas tersebut yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim. Presiden Biden berjanji akan mengalihkan penggunaan energi fosil ke energi bersih di bidang infrastruktur. Biden (2021) berkomitmen untuk menjadikan AS sebagai negara ramah lingkungan yang direalisasikan dengan cara menandatangani *Executive Order* pada 8 Desember 2021 untuk memastikan AS mampu mencapai energi bersih (*net-zero*) dan ekonomi nol emisi (*zero emission economy*) pada tahun 2050. AS memiliki peluang untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, yang akan menempatkan AS pada jalan yang tidak dapat diubah

untuk mencapai emisi nol bersih, di seluruh ekonomi, paling lambat tahun 2050. Perubahan kebijakan AS dari pemerintahan Trump ke pemerintahan Biden memiliki implikasi untuk ekonomi dunia yang lebih ramah lingkungan, termasuk menghasilkan peluang pembiayaan hijau di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menanggapi krisis perubahan iklim global sebagai elemen penting dari kebijakan AS dan agenda keamanan nasional di seluruh dunia.

Melalui penjelasan di atas, kebijakan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden cenderung bersifat ekosentris jika dianalisis menggunakan teori hijau. Dyer (2018) menyatakan bahwa ekosentrisme adalah sebuah prinsip dalam teori hijau yang memiliki prioritas terhadap ekosistem tempat manusia tinggal karena ekosistem merupakan kunci bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia. Hal tersebut sinkron dengan kebijakan Biden yang setuju untuk meratifikasi kembali *Paris Agreement* atas dasar lingkungan yaitu dampak yang dirasakan dari perubahan iklim semakin terasa. Tidak hanya itu, ekosentrisme Amerika Serikat pada masa pemerintahan Biden juga ditunjukkan melalui upaya Biden yang menandatangani *Executive Order* mengenai *net-zero* yang berisi tentang komitmen AS untuk mencapai energi bersih nol emisi di tahun 2050.

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di Masa Pemerintahan Joe Biden

Jika dilihat melalui teori hijau, perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden terjadi karena perbedaan fokus kebijakan antara Biden dengan Trump yang merupakan Presiden Amerika sebelumnya. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Trump cenderung antroposentrisme yang lebih mementingkan kondisi ekonomi Amerika dan kurang memperhatikan mengenai masalah dalam sektor lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan yang diambil tersebut, sedangkan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Biden lebih ke ekosentrisme yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan ramah lingkungan yang dibuat oleh Biden.

Dyer (2018) berpendapat bahwa antroposentrisme secara langsung bertentangan dengan ekosentrisme karena fokusnya yang berbeda, dimana antroposentrisme berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan manusia sedangkan ekosentrisme berfokus terhadap kesejahteraan lingkungan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa fokus kebijakan yang berbeda antara Biden yang ekosentris dan Trump yang antroposentris tersebut menjadi faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden.

Perbedaan fokus kebijakan antara Trump yang antroposentris dan Biden yang ekosentris tersebut juga sesuai jika dijadikan faktor yang mengakibatkan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* dengan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti. Jika dilihat dengan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti, tipe perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden merupakan tipe restrukturisasi (*restructuring*), yaitu sebuah perubahan signifikan dari pola hubungan luar sebuah negara. Menurut penulis, perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden sesuai dengan tipe restrukturisasi yang dikemukakan oleh Holsti, karena perubahan kebijakan luar negeri tersebut bergerak secara cepat dan fundamental, dimana pada saat menjadi pemimpin Joe Biden langsung mengeluarkan *Executive Order* (EO) di hari pertama ia menjabat untuk mengembalikan Amerika dalam *Paris Agreement*. Selain itu, Amerika pada masa pemerintahan Joe Biden juga berkomitmen serius dalam *Paris Agreement* melalui berbagai kebijakan ramah lingkungan yang dikeluarkannya, yang berbeda dengan kebijakan Amerika pada masa pemerintahan Donald Trump.

Selain hal tersebut, perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Joe Biden ini juga mencakup beberapa faktor yang merupakan variabel dari tipe perubahan restrukturisasi yang dikemukakan Holsti, yaitu:

- (1) Ancaman Eksternal: Isu perubahan iklim merupakan ancaman multidimensional yang dialami dunia internasional. Joe Biden menganggap bahwa pemanasan global yang diakibatkan oleh perubahan iklim merupakan ancaman serius yang tidak hanya dihadapi oleh Amerika, namun seluruh dunia, karena dampak dari perubahan iklim tersebut dirasakan oleh seluruh dunia. Joe Biden juga mendeklarasikan bahwa isu mengenai perubahan iklim tersebut merupakan masalah nomor satu yang dihadapi oleh umat manusia. Maka dari itu, Amerika Serikat melalui Joe Biden berusaha untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih parah dengan cara bergabung dan berkomitmen dalam *Paris Agreement* yang merupakan kesepakatan internasional untuk menekan kenaikan suhu bumi agar mencegah perubahan iklim menjadi lebih jauh dan mengakibatkan dampak yang lebih parah.
- (2) Ancaman Domestik: Seperti yang dijelaskan di atas, isu mengenai perubahan iklim tidak hanya dihadapi oleh Amerika, namun juga seluruh dunia. Tetapi, Amerika dari masa revolusi industri hingga saat ini adalah salah satu negara yang memproduksi emisi gas dunia terbesar. Oleh karena itu, Amerika merasakan dampak yang besar dari perubahan iklim tersebut, antara lain kekeringan yang terjadi di California serta polusi udara dan air yang melanda Amerika Serikat. Biden berpendapat bahwa setiap rakyat Amerika berhak untuk menghirup udara segar, meminum air bersih, dan memakan makanan sehat. Permasalahan lingkungan tersebut menjadi urgensi internal Amerika Serikat untuk kembali meratifikasi *Paris Agreement* dan ikut berkomitmen bersama dengan dunia internasional untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih parah.
- (3) Persepsi dan Kalkulasi Pengambil Kebijakan: Joe Biden menyebutkan bahwa salah satu dari beberapa tantangan besar yang dihadapi Amerika Serikat dan juga dunia internasional adalah isu mengenai perubahan iklim (Berwyn, 2021).

Biden juga mengatakan bahwa “Generasi mendatang harus dapat melihat kembali kita dan berkata bahwa kita menyembuhkan tanah yang rusak”. Dari pidato Biden tersebut, penulis berpendapat bahwa persepsi dan kalkulasi pengambilan kebijakan dari Joe Biden mempengaruhi dirinya untuk meratifikasi kembali *Paris Agreement*. Biden mengatakan secara langsung bahwa isu perubahan iklim adalah tantangan yang besar dan ia juga secara tidak langsung mengkalkulasi bahwa jika tidak segera mengambil tindakan untuk menanggulangi perubahan iklim ini, generasi mendatang hanya akan melihat tanah yang rusak.

- (4) Restrukturisasi berupa Penghentian Kebijakan: Pada pernyataan yang Biden tulis saat kampanye, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat harus memimpin dunia untuk mengatasi ancaman eksistensial yang sedang dihadapi umat manusia, yaitu isu perubahan iklim. Biden menyatakan di pernyataan tersebut bahwa ia akan bergabung kembali pada *Paris Agreement* pada hari pertama pemerintahannya. Hal tersebut kemudian diwujudkan oleh Biden saat ia berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat dengan mengeluarkan *Executive Order* (EO) pada hari pertama ia resmi menjabat sebagai Presiden untuk meratifikasi kembali *Paris Agreement*.

Setelah analisis yang diuraikan di atas, penulis mendapat hasil bahwa melalui teori hijau, dapat dilihat adanya sebuah perbedaan fokus kebijakan antara masa pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan Trump, dengan masa pemerintahan sekarang, yaitu pada masa pemerintahan Biden. Kebijakan-kebijakan yang Trump keluarkan seperti keluar dari *Paris Agreement* karena alasan kerugian ekonomi cenderung bersifat antroposentris yang memiliki fokus terhadap kepentingan manusia tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan terhadap sekitar. Bertolak belakang dengan Trump, kebijakan-kebijakan yang Biden keluarkan seperti meratifikasi *Paris Agreement* karena alasan semakin parahnya isu perubahan iklim dan Amerika sebagai salah satu negara penghasil

emisi gas terbesar dunia harus ikut andil dalam penanggulangan isu perubahan iklim merupakan sebuah kebijakan yang bersifat ekosentrisme. Menurut penulis, adanya perbedaan fokus kebijakan dari Trump yang antroposentris ke Biden yang ekosentris menjadi faktor terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Selain itu, faktor tersebut juga sesuai dengan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan Holsti, dimana kebijakan yang dilakukan oleh Amerika dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Biden ini adalah tipe restrukturisasi karena perubahan terjadi secara cepat dan fundamental. Perubahan tersebut juga terjadi karena adanya perbedaan fokus kebijakan antara Trump yang antroposentris dan Biden yang ekosentris. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Holsti bahwa pengambil kebijakan adalah aktor utama dalam terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan tersebut sesuai dengan variabel analisis milik Holsti yang mencakup ancaman eksternal dan ancaman domestik. Biden melihat bahwa isu perubahan iklim merupakan isu multidimensional yang tidak hanya mengancam Amerika, namun juga seluruh dunia. Terjadinya masalah lingkungan di Amerika seperti kekeringan, polusi udara, dan polusi air, yang kemudian membentuk persepsi dan kalkulasi Biden untuk mengambil kebijakan baru mengenai isu perubahan iklim. Akhirnya, saat Biden resmi menjabat sebagai Presiden, terciptanya sebuah restrukturisasi berupa penghentian kebijakan atau yang disebut Holsti dengan *reorientation* dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika dalam *Paris Agreement* dari yang semula keluar pada masa pemerintahan Trump menjadi ratifikasi kembali pada masa pemerintahan Biden.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan fokus kebijakan antara Trump yang antroposentris dan Biden yang ekosentris mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement*. Hal tersebut juga didukung melalui model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikembangkan Holsti, dimana pemimpin negara merupakan

aktor utama terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, penulis memiliki kesimpulan bahwa perbedaan fokus kebijakan antara Trump yang antroposentris dan Biden yang ekosentris menjadi faktor terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* di masa pemerintahan Biden. Hal tersebut dibuktikan dengan model analisis perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan Holsti, dimana pengambil kebijakan (dalam hal ini adalah pemimpin) merupakan aktor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam perubahan kebijakan luar negeri, tentu bukan hanya faktor pemimpin yang menjadi alasan kuat mengapa perubahan tersebut terjadi. Penelitian ini hanya memberikan gambaran mengenai faktor lingkungan dari teori hijau yang mempengaruhi aktor utama pengambil kebijakan dalam melakukan perubahan kebijakan luar negeri menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Holsti. Oleh karena itu, penulis memberi saran kepada peneliti lain yang ingin membahas topik serupa untuk menggunakan teori atau model analisis lain seperti model analisis yang dikembangkan oleh Hermann, Goldmann, Skidmore, Gustavsson, atau Rosneau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Dr. Hartuti Purnaweni, MPA selaku dosen penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Ali, S. (2022, March 28). *About half of US water 'too polluted' for swimming, fishing or drinking, report finds*. The Hill. <https://thehill.com/changing-america/sustainability/>

- environment/600070-about-half-of-us-water-too-polluted-for-swimming/ [diakses pada 7 September 2022]
- Berwyn, B. (2021, January 21). *The US Rejoins the Paris Agreement, but Rebuilding Credibility on Climate Action Will Take Time*. Inside Climate News. <https://insideclimatenews.org/news/21012021/biden-paris-climate-agreement/> [diakses pada 10 September 2022]
- Biden, J. (2021). *The Biden Plan to Secure Environmental Justice and Equitable Economic Opportunity*. BIDEN - HARRIS Campaign. <https://joebiden.com/environmental-justice-plan/#> [diakses pada 23 Oktober 2022]
- Dyer, H. (2018). *Introducing Green Theory in International Relations*. <https://www.e-ir.info/2018/01/07/green-theory-in-international-relations/>
- Hachiya, N. (2006). The History and the Present of Minamata Disease-Entering the second half a century-Investigation of Causative Agent and Spread of the Pollution Occurrence of Minamata Disease. In *JMAJ* (Vol. 49, Issue 3).
- Hananto. (2018). *Melihat Pertumbuhan Emisi Global Sejak 1850 dan Perkembangan Usaha Penurunannya - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id*. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/10/melihat-pertumbuhan-emisi-global-sejak-1850-dan-perkembangan-usaha-penurunannya/> [diakses pada 2 Agustus 2022]
- Hardani, H., Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Holsti, K. J. (1982). *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in The Post War World*.
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report*.
- Kompas. (2020). *AS Resmi Keluar dari Perjanjian Paris di Tengah Ketidakpastian Pemilu Halaman all - Kompas.com*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/05/064018870/as-resmi-keluar-dari-perjanjian-paris-di-tengah-ketidakpastian-pemilu?page=all> [13 Oktober 2022]

- Lee, N. (2021, April 22). *135 million Americans are breathing unhealthy air, American Lung Association says*. CNBC. <https://www.cnn.com/2021/04/22/heres-how-many-americans-are-affected-by-air-pollution-every-year.html> [diakses pada 26 Agustus 2022]
- Maciej Serda. (2013). Synteza i aktywność biologiczna nowych analogów tiosemikarbazonowych chelatorów żelaza. *Uniwersytet Śląski*, 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Malinda, D. (2018). Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Keputusan Donald Trump Keluar Dari Paris Agreement.
- Newburger, E. (2021, January 20). *President Joe Biden rejoins the Paris climate accord in first move to tackle global warming*. CNBC. <https://www.cnn.com/2021/01/20/biden-inauguration-us-rejoins-paris-climate-agreement.html> [diakses pada 16 Oktober 2022]
- Paramitha, S. D. (2021). *ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NATIONAL SWORD TIONGKOK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF GREEN THEORY* (Doctoral dissertation).
- Rhodes, C. J. (2016). The 2015 Paris climate change conference: COP21. In *Science Progress* (Vol. 99, Issue 1, pp. 97–104). Science Reviews 2000 Ltd. <https://doi.org/10.3184/003685016X14528569315192>
- Sinaga, I. F., & Rosyidin, M. (2020). Analisis Emosi Presiden Donald Trump Terhadap Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement. *Journal of International Relations*, 6(3), 411-421.
- Sipayung, H. M. (2015). *195 negara setuju “Kesepakatan Paris”* - ANTARA News. ANTARA. <https://www.antarane.ws.com/berita/534820/195-negara-setujui-kesepakatan-paris> [diakses pada 7 Agustus 2022]
- Subiyanto, A., Boer, R., Aldrian, E., Perdinan, P., & Kinseng, R. (2018). Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 287. <https://doi.org/10.22146/jkn.37734>

- The New York Times. (2016, December 19). *Climate Change News That Stuck with Us in 2016 - The New York Times*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2016/12/19/science/2016-global-warming-news.html> [diakses pada 23 Agustus 2022]
- U.S. Environmental Protection Agency. (2011). *The Benefits and Costs of the Clean Air Act from 1990 to 2020: Summary Report*. <http://www.epa.gov/oar/sect812/prospective2.html> [diakses pada 24 Agustus 2022]
- Winarno, B. (2014). *Dinamika isu-isu global kontemporer* (T. Admojo, Ed.). CAPS.
- Zhang, H. bin, Dai, H. C., Lai, H. X., & Wang, W. T. (2017). U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 220–225. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.09.002> [diakses pada 10 September 2022]